

## ANALISIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Oleh :

**Siswanto<sup>1</sup>**

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Banten,  
Indonesia

[siswanto@pknstan.ac.id](mailto:siswanto@pknstan.ac.id)

**Iskandar<sup>2</sup>**

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Banten,  
Indonesia

[iskandar@pknstan.ac.id](mailto:iskandar@pknstan.ac.id)

**Kodirin<sup>3</sup>**

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Banten,  
Indonesia

[kodirin@pknstan.ac.id](mailto:kodirin@pknstan.ac.id)

Co Author \*[siswanto@pknstan.ac.id](mailto:siswanto@pknstan.ac.id)

**Info Article :**

Diterima : 18 Okt 2023

Direview : 23 Okt 2023

Disetujui : 01 Nov 2023

### ABSTRACT

*This research aims to determine the process of preparing financial reports for Village-Owned Enterprises in Belitung Timur Regency. This research was conducted on 5 village-owned enterprises in Belitung Timur Regency. The research method is qualitative with a case study approach related to the process of preparing financial reports carried out by village-owned enterprises in 2022 and 2023 as well as looking at sample data from other village-owned enterprises financial reports. The research results show that village-owned enterprises financial reports in Belitung Timur Regency have generally not been prepared in accordance with applicable standards. In 2023, Belitung Timur Regency village-owned enterprises will have prepared financial reports using an application, but there are still several errors that occur, this is because the education process for village-owned enterprises managers is still ongoing. This research offers several solutions that can be implemented, including the regional government issuing regulations requiring village-owned enterprises to prepare financial reports according to standards, and holding training for village-owned enterprises managers.*

**Keywords:** Accounting, Village-Owned Enterprises, Financial Reporting

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kabupaten Belitung Timur. Penelitian ini dilakukan terhadap 5 BUMDes di Kabupaten Belitung Timur. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus terkait proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes pada tahun 2022 dan 2023 serta melihat data sampel laporan keuangan BUMDes lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes pada Kabupaten Belitung Timur secara umum belum dibuat sesuai dengan standar yang berlaku. Pada tahun 2023, BUMDes Kabupaten Belitung Timur sudah menyusun laporan keuangan dengan aplikasi, namun masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi, hal ini disebabkan memang proses edukasi terhadap pengelola BUMDes masih terus berjalan. Penelitian ini menawarkan beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain

pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang mewajibkan BUMDes menyusun laporan keuangan sesuai standar, dan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pengelola BUMDes.

**Kata Kunci:** Akuntansi, BUMDes, Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas yang diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun (Republik Indonesia, 2014), pada bagian penjelasannya disebutkan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam rangka mendayagunakan semua potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan makin meningkatnya peran BUMDes di desa, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di masa yang akan datang. Penelitian Rosa Ratna Sri Anggraeni & Jaya Yogyakarta, (2016) menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, Meskipun peningkatan kesejahteraan warga tidak secara langsung dapat dirasakan.

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi wisata cukup menarik. Salah satu andalan potensi yang menarik untuk peningkatan usaha BUMDesa di Kabupaten Belitung Timur adalah obyek wisata dan produksi madu trigona. Sebagai contoh untuk sektor wisata, sudah dilakukan oleh BUMDesa Mekar Jaya yang mempunyai unit usaha *waterboom*. Penelitian yang dilakukan oleh Krismonni et al., (2022) pada BUMDesa Mekar Jaya menunjukkan bahwa unit usaha *waterboom* belum menunjukkan hasil yang menguntungkan, bahkan cenderung mengalami penurunan dari sisi pengunjung. Hal ini disebabkan karena unit usaha *waterboom* didirikan pada tahun 2020, di mana pada saat itu bertepatan dengan wabah covid-19. Namun berdasarkan observasi penelitian dilapangan Krismonni et al., (2022)., kedepannya unit usaha *waterboom* ini akan mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat bahwasannya, pengunjung sebelum adanya wabah covid sangat ini sangat membludak sekali. Faktor-faktor pendukung lainnya juga akses antara desa-desa yang ada di daerah Manggar untuk mengunjungi objek wisata tersebut dapat dijangkau dengan mudah. Selain itu juga unit usaha *waterboom* ini merupakan satu-satunya yang ada

di kecamatan Manggar. Sehingga pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari masyarakat Desa Mekar Jaya saja, masyarakat diluar Desa Mekar Jaya juga banyak yang datang berkunjung.

Pada tahun 2023, BUMDes Mekar Jaya juga diusulkan sebagai BUMDes antikorupsi. Sebagaimana dikutip dari (Ahmadi, 2023) Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melakukan observasi desa antikorupsi di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). "Kita melakukan observasi terhadap Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar yang sudah diusulkan sebagai desa percontohan antikorupsi 2023," kata Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno di Manggar.

Salah satu dampak pengusulan program antikorupsi adalah tertibnya proses administrasi dan keuangan yang terdapat pada BUMDes. Bukti bahwa BUMDes sudah melakukan tertib administrasi dan keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusunnya. Kewajiban BUMDes untuk menyusun laporan keuangan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 27 ayat (2) tersebut mengatur bahwa pelaksana operasional BUMDesa mempunyai tugas untuk menyusun laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas. Dengan demikian, program BUMDes antikorupsi seharusnya dapat menjadi pemantik bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong BUMDes-BUMDes lainnya untuk menyusun laporan keuangan dengan benar.

Di tengah potensi ekonomi BUMDes yang ada pada Kabupaten Belitung Timur serta program pengusulan BUMDes antikorupsi sebagaimana dijelaskan di atas, ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Masalah tersebut adalah terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes tersebut, termasuk di dalamnya permasalahan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes. Yasni et al., (2023) menyatakan bahwa berbagai kendala dalam pelaksanaan pembukuan ditemui di antaranya berupa bukti pendukung yang kurang

lengkap, khususnya ketika terjadi transisi kepengurusan BUMDesa dan peralihan pencatatan keuangan BUMDesa dari basis kas ke akuntansi akrual. Di samping itu juga SDM BUMDesa Belitung Timur masih terbatas dikarenakan belum memahami dengan baik terkait pencatatan transaksi usaha dan pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini bermaksud untuk mendalami lebih jauh permasalahan-permasalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dialami BUMDes di Kabupaten Belitung Timur pada umumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi yang secara praktis dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mengembangkan potensi BUMDes.

## KAJIAN PUSTAKA

### Akuntansi dan Laporan Keuangan

Oleh berbagai ahli, akuntansi sering didefinisikan sebagai sebuah proses penyajian informasi keuangan yang terjadi pada suatu entitas di periode tertentu. Proses tersebut dimulai dari kegiatan pengidentifikasian transaksi, mencatat, merangkum, mengolah, melaporkan, hingga menginterpretasikan data-data keuangan. Kieso et al., (2014) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai sebuah sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.

Sementara itu, Martani et al., (2019) menyampaikan bahwa ada empat hal penting dari akuntansi yaitu: 1. input akuntansi, yaitu transaksi yang bersifat keuangan dimana transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang harus disertai bukti valid; 2. Proses, yang merupakan serangkaian aktivitas untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi tersebut guna menjadi sebuah laporan keuangan; 3. Output akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; 4. Pengguna informasi keuangan yang merupakan pihak-pihak yang memakai laporan keuangan untuk keperluan mengambil keputusan.

### Standar Akuntansi Keuangan EMKM

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 24 Oktober 2016 dan berlaku secara efektif 1 Januari 2018. Diterbitkannya SAK EMKM bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM di seluruh Indonesia dalam mengimplementasikan laporan keuangan. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan yang wajib dibuat oleh entitas hanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah, 2018). BUMDes pada Kabupaten Belitung Timur apabila dilihat dari sisi peredaran brutonya masih masuk dalam kategori EMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

### METODOLOGI PENELITIAN

Creswell, (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui beberapa upaya. Sebagai contoh dengan cara mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Masih menurut Creswell, (2015) studi kasus adalah penelitian dengan strategi menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Dalam hal ini, kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap melalui berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penggunaan strategi studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara lengkap terkait proses bisnis penyusunan laporan keuangan bumdes yang telah dilakukan.

Obyek penelitian adalah BUMDes pada Kabupaten Belitung Timur. Di mana sebanyak 5 BUMDes diteliti secara mendalam dengan melakukan kunjungan dan melakukan wawancara kepada pengelola BUMDes dan *stake holder* lainnya. BUMDes yang didalami dalam penelitian ini adalah BUMDes LML, BUMDes SJ, BUMDes MBB, BUMDes MS, dan BUMDes PS.

Hal yang diteliti dari BUMDes adalah terkait proses pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh BUMDes di tahun 2022 dan 2023. Wawancara juga dilakukan terhadap para tenaga pendamping Profesional P3MD Belitung Timur yaitu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (selanjutnya disebut tim pendamping BUMDes) dan para pendamping desa Kemendes. Di samping itu, peneliti juga sempat melakukan diskusi dengan Bupati Belitung Timur, serta jajaran pejabat dan pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Kabupaten Belitung Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan pengelola BUMDes, *stake holder* BUMDes, para pendamping BUMDes (yang berasal dari DSPMD Kabupaten Belitung Timur dan dari Kemendes), serta pejabat dan pegawai pada DSPMD Kabupaten Belitung Timur. Data sekunder yang diperoleh berupa data laporan keuangan yang telah disusun BUMDes dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan berbasis excel.

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara dalam hal pengambilan data penelitiannya. Data diambil secara langsung di lapangan serta secara tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi, wawancara dan observasi di lapangan. Interaksi secara langsung telah dilakukan selama 7 hari yang dilaksanakan pada tahun 2022 (selama 5 hari) dan 2023 (selama 2 hari). Sementara itu, data yang diperoleh secara tidak langsung dilakukan dengan berbagai media dalam jaringan internet berupa diskusi *zoom meeting* dan *whatsaps* serta *website* dan *youtube*.

Secara rinci, teknik atau tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengumpulkan data terkait kondisi laporan keuangan BUMDes

Kegiatan dilakukan dengan terlebih dahulu berdiskusi dengan DSPMD Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan secara *online*. Diskusi

dilakukan untuk mengetahui profil BUMDes yang ada di Kabupaten Belitung Timur dan sejauh mana proses penyusunan laporan keuangan yang sudah dilakukan. Dari hasil diskusi, diperoleh informasi bahwa jumlah BUMDes di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 BUMDes. Pada tahun 2022, mulai dicanangkan penyusunan laporan keuangan BUMDes dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan berbasis excel. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun 2023.

#### 2. Melakukan Pengumpulan Data Proses Bisnis BUMDes tertentu di lapangan.

Tim peneliti berkesempatan untuk berinteraksi dengan seluruh pengurus BUMDes pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan di tahun 2022 dan tahun 2023. Pengurus BUMDes yang hadir, secara umum diwakili Direktur dan Bendahara BUMDes. Selain pengurus BUMDes pada kesempatan itu juga hadir pendamping BUMDes yang berasal dari DSPMD Kabupaten Belitung Timur dan Pendamping BUMDes dari Kemendes. Momen tersebut digunakan untuk menggali informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi BUMDes dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Kemudian setelah itu, data proses bisnis BUMDes di dalam dengan cara melakukan kunjungan ke 5 (lima) BUMDes yaitu BUMDes LML, BUMDes SJ, BUMDes MBB, BUMDes MS, dan BUMDes PS. Kegiatan yang dilakukan adalah menggali informasi sebanyak mungkin terutama sejauh mana proses penyusunan laporan keuangan yang sudah dilakukan.

#### 3. Melakukan diskusi lanjutan secara daring

Diskusi lanjutan secara daring dilakukan untuk menggali kembali perkembangan pengetahuan SDM BUMDes dalam menyusun laporan keuangan. Diskusi dilakukan dengan tim pendamping BUMDes. Informasi yang diperoleh berupa perkembangan BUMDes dalam menyusun laporan keuangan. Dari informasi yang diperoleh, tim peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah pengurus BUMDes dapat memahami teknik penyusunan laporan keuangan, serta mendapatkan informasi lainnya yang menjadi penyebab kendala proses penyusunan laporan keuangan BUMDes masih belum sesuai.

#### 4. Mempelajari literatur-literatur terkait

Tahap ini, penulis mempelajari literatur-literatur terkait dengan teori akuntansi, antara lain

prinsip-prinsip akuntansi, teori basis pencatatan akuntansi dan standar akuntansi terkait. Selain literatur akuntansi, beberapa peraturan terkait desa dan BUMDes juga dipelajari agar lebih cepat memahami kondisi BUMDes di lapangan.

#### 5. Melakukan analisis dan menyusun rekomendasi

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dengan membandingkan dengan teori dan standar yang ada. Hasil dari analisis data dan informasi yang dikumpulkan kemudian ditelaah secara detail sehingga dapat menjadi sebuah temuan apakah fenomena praktik penyusunan laporan keuangan BUMDes sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Setelah hasil temuan diidentifikasi, kemudian dirumuskan rekomendasi praktis yang dapat dilakukan baik bagi pengurus BUMDes, *stake holder* terkait, maupun pemerintah daerah yang bidang tugasnya menangani BUMDes.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pada tahun 2022, DSPMD Kabupaten Belitung Timur menginstruksikan seluruh BUMDes untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi excel dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Jumlah BUMDes pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 BUMDes. Dari seluruh BUMDes tersebut, ada 2 (dua) BUMDes yang tidak menggunakan karena satu BUMDes sudah menggunakan aplikasi lain, sementara BUMDes yang satunya tidak aktif. Dari 39 BUMDes tersebut, tim peneliti melakukan kunjungan ke 5 (lima) BUMDes untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan cara melakukan wawancara dan melihat langsung proses bisnis yang terdapat di BUMDes.

Sebelum penggunaan aplikasi laporan keuangan berbasis excel, pada tahun 2022, telah dilaksanakan bimbingan teknis serta pendampingan mengenai dasar-dasar akuntansi dan penggunaan aplikasi laporan keuangan excel kepada pengurus BUMDes dan pendamping BUMDes dari DSPMD Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pendampingan kepada tenaga pendamping BUMDes. Hal ini dilakukan karena di lapangan tenaga pendamping BUMDes yang akan melakukan pembinaan kepada pengurus BUMDes untuk menyusun laporan keuangan dengan aplikasi excel dan sesuai dengan konsep akuntansi yang sesuai standar.

Di tahun 2023, diskusi terkait proses penyusunan laporan keuangan BUMDes tetap dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan teknis terkait dasar-dasar akuntansi dan penggunaan aplikasi laporan keuangan excel tingkat 2. Setelah kegiatan tersebut dilakukan, proses pendampingan dan monitoring kemajuan proses penyusunan laporan keuangan tetap dilakukan dengan menggunakan media *on line*. Monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan ilmu akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2023, tim peneliti mendapatkan data berupa *soft copy* laporan keuangan tahun 2022 beberapa BUMDes pada Kabupaten Belitung Timur. Data *soft copy* laporan keuangan BUMDes yang diteliti tidak terbatas pada obyek 5 (lima) BUMDes yang didalami, namun juga ada beberapa BUMDes lainnya. Data tersebut kemudian menjadi bahan diskusi dan analisis antara tim peneliti dengan tenaga pendamping BUMDes. Selain melakukan diskusi terkait laporan keuangan yang sudah dibuat oleh BUMDes, kelanjutan kegiatan terkait penyusunan laporan keuangan BUMDes tahun 2023 terus dilakukan antara tim peneliti dan tenaga pendamping BUMDes.

Beberapa hal yang yang dapat ditarik benang merah masalah dari laporan keuangan yang diterima tim peneliti dan hasil wawancara terhadap BUMDes, *stake holder* BUMDes, dan tenaga pendamping, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam identifikasi aset dan liabilitas awal, serta penentuan saldo awal neraca, masih banyak yang belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya, hal ini disebabkan antara lain SDM BUMDes rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, banyak aset yang tidak disimpan atau dikelola dengan baik, sehingga rusak atau hilang.
2. Untuk BUMDes yang mempunyai unit usaha pertokoan, pengelola BUMDes masih belum memahami proses akuntansi persediaan, sehingga dalam jurnal penjualan persediaan tidak muncul harga pokok penjualan.
3. Ada beberapa BUMDes yang sudah melakukan penjurnalan terhadap harga pokok penjualan, namun pengelola BUMDes kesulitan mencari nilainya, hal ini disebabkan pengelola BUMDes/toko tidak melakukan pencatatan harga perolehan persediaan dengan tertib.

4. Secara umum, BUMDes belum melakukan penyusutan terhadap aset tetapnya. Hal ini disebabkan pengelola BUMDes tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga tidak memahami esensi penyusutan dan teknik melakukan penyusutan aset tetap.

Secara lebih detail, hasil analisis atas penyusunan laporan keuangan BUMDes sebagaimana dijelaskan pada sub bab pembahasan di bawah ini.

### Pembahasan

Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan oleh BUMDes

Dari serangkaian kegiatan pengamatan, observasi dan pengumpulan data atas kegiatan penyusunan laporan keuangan oleh BUMDes. Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang masih muncul, dan dapat berdampak kepada terhambatnya proses penyusunan laporan keuangan BUMDes yang sesuai standar. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum Memahami Cara Mengidentifikasi Saldo Awal Neraca

. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah, 2018) mengatur bahwa entitas harus mengakui seluruh aset dan liabilitas yang dimilikinya dan kemudian melakukan pengukuran atas aset dan liabilitas tersebut. Karena BUMDes sudah berdiri sejak beberapa tahun sebelum dilakukan upaya penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, maka BUMDes harus melakukan penyesuaian atas harga perolehan aset dan liabilitas yang sudah teridentifikasi.

Dalam proses pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes, pada tahap awal, sebelum memulai pencatatan dengan akuntansi basis akrual, BUMDes melakukan identifikasi aset dan kewajibannya terlebih dahulu. Aset dan kewajiban yang sudah diidentifikasi kemudian ditentukan saldonya. Dari hasil sampel observasi lapangan serta penelaahan dokumen laporan keuangan yang sudah disusun, identifikasi saldo awal neraca masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Kendala yang terjadi adalah dalam proses identifikasi aset dan liabilitas banyak catatan yang tidak dikumpulkan dengan baik, atau hilang, sehingga jejak nilai aset tersebut sulit untuk ditentukan. Hal tersebut menyebabkan data dan informasi yang disajikan BUMDes masih dianggap

belum akurat. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra et al., (2023) pada BUMDes Maskumambang yang menemukan bahwa pengelolaan laporan keuangan BUMDes dinilai kurang akuntabel bagi pihak yang membutuhkan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, disarankan untuk pendamping BUMDes secara rutin melakukan diskusi internal dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang menguasai ilmu akuntansi. Pendamping BUMDes kemudian melakukan pembinaan kepada pengurus BUMDes agar mereka dapat memahami cara mengidentifikasi dan menentukan saldo awal aset dan kewajiban BUMDes.

2. Belum Memahami Proses Akuntansi untuk Persediaan Barang Dagang

Bagi BUMDes yang mempunyai unit usaha pertokoan, maka secara teori sudah seharusnya melakukan manajemen pencatatan persediaan dengan baik. Manajemen pencatatan persediaan yang harus dilakukan meliputi pencatatan kuantitas seluruh jenis persediaan dan juga mencatat harga perolehan seluruh jenis persediaan dengan tertib.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ada beberapa BUMDes yang sudah melakukan manajemen pencatatan persediaan dengan baik, dan ada juga yang belum melakukan manajemen pencatatan persediaan dengan baik. Bagi BUMDes yang sudah melakukan manajemen pencatatan persediaan dengan baik, biasanya sudah memiliki aplikasi *point of sales* (POS).

Ada beberapa dampak yang akan terjadi ketika BUMDes tidak memahami bagaimana proses akuntansi persediaan barang dagangan. Dampak tersebut antara lain:

- a. BUMDes tidak mempunyai catatan rinci terkait kuantitas persediaan barang dagangannya.
- b. BUMDes tidak mempunyai catatan rinci terkait harga perolehan persediaan barang dagangannya, dan
- c. BUMDes tidak dapat mendapatkan harga pokok penjualan (HPP).

Bagi BUMDes yang belum memiliki aplikasi POS, maka solusi sederhana dan praktis adalah melakukan pencatatan persediaan dengan metode periodik. Dengan metode ini, pengurus BUMDes harus menghitung secara fisik jumlah dan nilai persediaannya di akhir periode. Dengan metode ini persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan terhitung pada setiap akhir periode. Namun kelemahan sistem ini adalah BUMDes tidak dapat

melakukan monitoring atas stok persediaan barang dagangannya sewaktu-waktu, sehingga ada kemungkinan apabila ada persediaan barang dagangan habis, namun tidak terdeteksi secara cepat.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah, mengatur bahwa dalam proses pengakuan dan pengukuran persediaan, maka mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke dalam kondisi dan lokasi siap digunakan. Metode pencatatan yang dapat digunakan entitas bisa dengan metode masuk-pertama-keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan.

Solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan ini, secara umum sama seperti solusi permasalahan nomor 1 di atas. Peran tenaga pendamping dalam membina pengurus BUMDes sangat diperlukan. Pendamping BUMDes perlu untuk lebih sering berdiskusi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang ahli dalam ilmu akuntansi untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.

Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian terdahulu, permasalahan terkait persediaan pada BUMDes ditemukan oleh Mesta & Rachmat, (2021) dimana BUMDes yang diteliti yaitu BUMDes Karya Maju Kec. Keluang belum menerapkan penilaian persediaan barang dagang karena perusahaan menggunakan aplikasi untuk melakukan pencatatan persediaan, dan belum sesuai dengan SAK EMKM tahun 2018.

### 3. Pengurus BUMDes tidak memahami akuntansi aset tetap

Dalam akuntansi aset tetap, poin penting yang harus dilakukan oleh entitas adalah terkait pengukuran nilai aset tetap tersebut setelah perolehan. SAK EMKM, mengatur bahwa Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sementara tanah diukur pada biaya perolehan.

Dampak dari hal ini, setiap akhir periode, BUMDes harus melakukan penilaian aset tetap yang dimilikinya setiap akan menyusun laporan keuangan. Bagi sebagian besar BUMDes pada Kabupaten Belitung Timur, ukuran usahanya masih dikategorikan sebagai usaha kecil dan mikro, sehingga dalam rangka proses penilaian aset tetapnya cukup dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap periode dengan metode yang

sederhana (garis lurus atau saldo menurun). Hasil pengamatan secara langsung dan tidak langsung menunjukkan, BUMDes secara umum belum melakukan penyusutan aset tetapnya. Hal ini menyebabkan aset tetap BUMDes senantiasa tercatat sebesar harga perolehannya.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anisykuriillah et al., (2022) pada BUMDes Asung Daya Kabupaten Semarang. Pada BUMDes Asung Daya belum dapat menyajikan besarnya akumulasi penyusutan dan beban penyusutan di dalam laporan keuangannya sehingga laporan tersebut belum menerapkan prinsip akuntabel.

Untuk mengatasi masalah ini, pendamping desa sudah melakukan kegiatan bimbingan teknis dengan mengundang pengurus BUMDes guna memahami teknik perhitungan penyusutan aset tetap. Namun setelah pelaksanaan bimbingan teknis, pendamping desa disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang menguasai ilmu akuntansi agar terjaga akurasi dari proses perhitungan penyusutan aset tetap yang sudah dilakukan.

Di samping masalah-masalah secara teknis dalam proses penyusunan laporan keuangan BUMDes Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini juga menemukan permasalahan-permasalahan non-teknis yang apabila tidak ditangani juga dapat menghambat proses penyusunan laporan BUMDes yang sesuai dengan standar. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

### 1. Pengguna Laporan Keuangan Tidak Bisa Memahami Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan

Secara tradisional, laporan keuangan yang sudah disusun oleh BUMDes dengan menggunakan basis kas. Laporan keuangan basis kas, hanya memberikan informasi kas masuk, kas keluar, serta saldo kas saja. Bagi *stake holder*, membaca laporan keuangan basis kas sangat mudah dipahami maksudnya.

Saat BUMDes sudah menyusun laporan keuangan dengan aplikasi excel, pengurus BUMDes sudah dibekali sedikit demi sedikit konsep akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, di mana termasuk diberikan pemahaman terkait akuntansi basis akrual. Hasil keluaran dari laporan keuangan dengan aplikasi excel adalah laporan keuangan basis akrual. Permasalahan yang muncul berikutnya adalah, pengguna laporan keuangan

BUMDes, baik internal maupun eksternal tidak dapat memahami cara membaca laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi excel tersebut.

2. Pergantian pengurus BUMDes yang begitu cepat

Pasal 26 (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021) mengatur bahwa pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan. Pengurus BUMDes secara umum mudah berganti dalam waktu yang cepat. Banyak faktor yang menyebabkan mutasi pengurus BUMDes begitu cepat. Hasil pengamatan dan wawancara menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan adalah tidak jelasnya imbalan atau penghasilan yang diterima pengurus BUMDes. Pergantian pengurus BUMDes ini, menyebabkan tata kelola BUMDes dimulai dari awal kembali, karena biasanya tidak lengkapnya penyerahan dokumentasi dan pencatatan dari pengurus sebelumnya, sehingga membuat pengurus yang baru kesulitan untuk melanjutkan pencatatan transaksi di masa yang akan datang.

Secara umum, pengurus BUMDes diberikan penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba yang diperoleh BUMDes. Dengan kondisi BUMDes saat ini, di mana secara ekonomis keuntungannya masih sangat kecil, menyebabkan SDM pengurus BUMDes juga mendapatkan penghasilan yang kecil, sehingga menyebabkan de-motivasi pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, saran dari penelitian ini adalah perlu adanya regulasi dari Pemerintah Daerah yang mengatur Desa dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Aturan yang perlu disisipkan adalah terkait mekanisme penggajian pengurus BUMDes. Pemerintah Kabupaten dapat meminta musyawarah desa untuk membuat disain penggajian bagi pengurus BUMDes menjadi lebih menarik. Sebagai contoh, pengurus BUMDes diberikan komponen gaji tetap dan tunjangan. Dengan disain penghasilan yang baru, diharapkan motivasi pengurus BUMDes meningkat dalam rangka mengelola BUMDes.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian, Pengurus BUMDes, terutama bendahara, mayoritas tidak mempunyai latar belakang ilmu akuntansi, sehingga menyebabkan proses pemahaman dasar-dasar akuntansi membutuhkan waktu yang lebih lama. Masalah ini dapat diatasi dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada Bendahara BUMDes dengan intensif. Selain itu, apabila ada BUMDes yang sedang merekrut pengurus, diarahkan SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Strategi BUMDes dalam peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan diantaranya juga dapat dilakukan melalui kegiatan; (a) memberikan sosialisasi tentang aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan yang dapat digunakan oleh anggota BUMDes, dengan sosialisasi bersama kepada pengelola Desa, Pemerintah Daerahserta masyarakat setempat dapat meningkatkan ekonomi perdesaan untuk dapat tertarik pihak swasta berkolaborasi, (b) merekrut dan memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan agar bisa bermanfaat dan efisiensi dalam penggunaan dana, (c) menambah anggaran untuk kedepannya (Rosari et al., 2022).

## KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada 39 BUMDes di Kabupaten Belitung Timur setelah mendapatkan bimbingan teknis dasar-dasar akuntansi dan setelah dilakukan pendalaman informasi proses bisnis terhadap 5 BUMDes yaitu BUMDes LML, BUMDes SJ, BUMDes MBB, BUMDes MS, dan BUMDes PS secara umum adalah bahwa pengurus BUMDes masih belum paham terkait konsep akuntansi. Temuan dari penelitian antara lain BUMDes masih belum memahami cara mengidentifikasi serta menilai aset dan kewajibannya, masih terdapat kendala dalam memahami akuntansi persediaan barang dagangan serta akuntansi aset tetap. Di samping temuan teknis penyusunan laporan keuangan BUMDes, penelitian juga menemukan hal-hal non-teknis yang turut serta menghambat proses penyusunan laporan keuangan BUMDes, yaitu pengguna laporan keuangan tidak memahami makna informasi yang disajikan, pergantian pengurus BUMDes yang relatif sering, serta SDM BUMDes yang tidak berlatar belakang akuntansi.

## Rekomendasi

Dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana dimaksud di atas, beberapa

rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain adalah untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada daerah lain yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Kabupaten Belitung Timur. Bisa dilihat dari sudut pandang kebijakan pemerintah, potensi sumber daya alam wilayah setempat, atau aspek lainnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, penelitian ini merekomendasikan agar kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM BUMDes khususnya terkait kemampuan penyusunan laporan keuangan agar tetap dilaksanakan dan ditingkatkan. Kegiatan tersebut dapat melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam ilmu akuntansi antara lain perguruan tinggi. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga dapat membuat regulasi-regulasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi pengurus BUMDes dalam bekerja di tempatnya masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2023). *KPK RI observasi desa antikorupsi di Kabupaten Belitung Timur*. Antara Babel.
- Anisykurlillah, I., Mahmud, A., Latifah, L., Susilowati, N., & Saputra, A. M. (2022). *Penguatan Manajerial Pengurus BUMDes Asung Daya Dalam Penentuan Penyusutan Aset Tetap* (Vol. 3, Issue 4). <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/301>
- Creswell, J. P. (2015). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga* (3rd ed.). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah, (2018).
- Kieso, Donald.E, Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2014). *Intermediate Accounting* (2nd ed.). John Willey & Sons.
- Krismonni, Y., Sulaiman, A., & Saputra, P. P. (2022). Analisis Unit Usaha Waterboom Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mekar Jaya Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.34573>
- Martani, Veronica, Wardhani, Farahmita, & Tanujaya. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2 Buku 1* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Mesta, E. S., & Rachmat, R. Al. (2021). Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan SAK EMKM pada BUMDES Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.47747/jbme.v1i3.110>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).
- Republik Indonesia. (2014). *UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, (2021).
- Rosa Ratna Sri Anggraeni, M., & Jaya Yogyakarta, A. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155–167.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner*, 6(3), 2921–2930. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Saputra, A. N., Anggraeni, F. A., Restuti, M. D., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Di Bumdes Maskumambang*. 1(2), 223–231. <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/pmb>
- Yasni, R., Nugroho, A., & Sumantri, J. (2023). Kolaborasi Mewujudkan Pencatatan Akuntansi BUMDESA Belitung Timur Yang Lebih Baik. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(2), 168–181. <https://doi.org/10.35814/suluh.v4i2.4141>